

DAFTAR ISI	
LEMBAR PENGESAHAN.....	...i
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan dan kegunaan	15
D. Kerangka pemikiran	16
E. Metode Penelitian.....	33
BABII TINJAUAN TEORITIS PEMUDA, KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	
A. Definisi pemuda dan kepemudaan menurut peraturan perundang-undangan	
1. Pengertian pemuda pemudi.	39
2. Pengertian kepemudaan	33
3. Pengertian Organisasi kepemudaan	44
B. Tinjauan Teoritis Pemuda Pemudi dan Kepemudaan secara Filosofis, Historis, Psikologis, Yuridis ditingkat Internasional, Sosial dan Agama.. ...	46
x	
1. Tinjauan Teoritis Pemuda Pemudi dan Kepemudaan secara Filosofis dan Historis	46
2. Konsep pemuda pemudi dan kepemudaan secara psikologis	56
3. Konsep pemuda pemudi dan kepemudaan secara Yuridis di tingkat Internasional	59
4. Konsep pemuda pemudi dan kepemudaan secara Sosial dan Agama.	64
a. Konsep pemuda pemudi dan kepemudaan secara Agama.	64
b. Konsep pemuda pemudi dan kepemudaan secara sosial	66
C. Pemuda dan Organisasi Kepemudaan sebagai Subjek Hukum.	68
D. Penyelarasan Pengaturan tentang definisi Pemuda pemudi dan Anak di Indonesia.	72
BAB III DINAMIKA PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN	
A. Kondisi umum pemuda pemudi dan Organisasi kepemudaan di Jawa Barat..	76
B. Kedudukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah berhimpun Organisasi Kepemudaan dalam perspektif peraturan perundang -undangan.	87
C. Peran aktif pemuda dan organisasi kepemudaan di hubungkan dengan program Pencapaian Revolusi Mental.	97
D. Kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISORDA) Provinsi Jawa Barat	

dalam pembangunan Pemuda pemudi terhadap dinamika kepemudaaan... .. 102

xi

**BAB IV PARADIGMA PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN
PENERAPAN HUKUM KRITERIA PEMUDA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG
PEMUDA**

A. Penerapan hukum kriteria pemuda di kalangan pemuda pemudi dan organisasi kepemudaan di Jawa Barat..... 113

B. Konsistensi Penerapan hukum kriteria pemuda terhadap pemuda pemudi dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. 126

C. Konsekuensi terhadap penerapan hukum kriteria pemuda di kalangan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Pasca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. 143

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan. 153

B. Saran. 154

DAFTAR PUSTAKA 158

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

**DATA PESERTA DAN PENINJAU MUSYAWARAH DAERAH XIII
PEMUDA/KNPI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014**

xii

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Tabel 1.1 Perbedaan rentang usia di beberapa Organisasi Internasional. 63

2. Tabel 1.2 Perkembangan IPM Jawa Barat(Sumber : BPS Jawa Barat 2013). 83

3. Tabel 1.3 Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat terhadap sasaran RPJMD provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013 106

xiii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1. Gambar 1.1 Alur dasar peraturan perundang-undangan tentang hak berkumpul dan berserikat. 89

xiv

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

1. Grafik 1.1 Jumlah dan Persentase Pemuda Indonesia 2010-2030. 77

2. Grafik 1.2 Penduduk dan sumber daya manusia. 78

3. Grafik 1.3 Proporsi angkatan kerja berdasarkan usia. 84

4. Grafik 1.4. Presentasi organisasi kepemudaan Tahun 2013. 86